

Catatan Akhir Tahun ICW 2024

Melawan Gelap Tahun *Politik*





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	4
#Tahun Politik, Tahun Perlawanan Kecurangan	6
Pengembangan Rekamjejak.net	6
Melawan Ketertutupan KPU RI dan Partai Politik	7
Dari Pemantauan ke Judicial Review	9
#Dukungan Sahabat ICW Memperluas Jangkauan Kampanye Antikorupsi	12
Sekolah Antikorupsi Tasikmalaya: Orang Muda yang Beraksi	14
Lewat GAAS, Alumni Sekolah Antikorupsi Beraksi!	15
• Disabilitas dan Korupsi	15
• Cergam Anak Antikorupsi: Korupsi Di Sekitar Kita	16
• Pameran Seni Antikorupsi Sumber Daya Alam: CIYAAAT!	17
Pucuk Komedi 2024: Komedi Sebagai Media Kritik Sosial	18
Nobar Film : Dear Future Children	19
Rangkaian Kegiatan Memperingati 16HAKTP	19
#Kolaborasi Seni: Membangun Kesadaran Kritis Warga	22
Album Frekuensi Perangkap Tikus Vol 3: Menenun Suara dari Timur	22
Dadap Festival: Balada Pesisir	22
#Membangun Jejaring Antikorupsi	24
Perluasan Pengguna Akademi Antikorupsi	24
AKJA 2024: Menyalakan Api Antikorupsi dari Daerah	26
#Mengawal Pengadaan Pemerintah, Lahan Basah Korupsi	29
Warga Kawal Pengadaan	29
Kolaborasi KJI Mengawal Pengadaan Publik	31
Mendorong Penanganan Aduan PBJ yang Lebih Responsif	33
Penilaian Kinerja Swasta Kunci Mencegah Korupsi Dalam Rantai Pengadaan	34
#Advokasi Kebijakan Antikorupsi	37
Roadshow Mendorong Percepatan Pembahasan RUU Perampasan Aset	37
Mengawal Seleksi Komisioner KPK	39
Menggugat Pemenuhan Wajib Belajar Bebas Biaya	39
Memperluas Advokasi Antikorupsi di Tingkat Regional dan Internasional	43

Kata Pengantar

Presiden Prabowo dalam World Government Summit 2025 menyebut korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Pernyataan ini sejalan dengan banyaknya kasus yang merugikan negara triliunan rupiah di berbagai sektor, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Duta Palma, hingga Timah. Mega korupsi terbaru yang dibongkar penegak hukum adalah korupsi di Pertamina tahun 2018-2023 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun hanya pada 2023.

Korupsi juga masih menyerang pelayanan dasar yang dekat dengan publik. Tak heran, publik semakin apatis dengan narasi pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 yang disebut naik dari 34 ke 37 tak ubahnya skor pada satu dekade lalu dan masih di bawah skor puncak, yaitu 40 pada 2019.

Sayangnya, pernyataan keras Presiden tidak diiringi kebijakan antikorupsi yang konkret. Sebaliknya muncul wacana yang bertentangan dengan semangat antikorupsi. Diantaranya yaitu ide Presiden memaafkan koruptor yang mengembalikan uang negara dan rencana Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk memberlakukan “denda damai” terhadap pelaku korupsi. Menteri yang juga mantan anggota DPR ini juga menyatakan KPK tak lagi diperlukan jika tiga UU Politik, UU Perampasan Aset, dan UU Pembatasan Uang Kartal sudah disahkan.

Di sisi lain, rancangan UU Perampasan Aset dan UU Pembatasan Uang Kartal tidak kunjung menjadi prioritas. Dua UU penting tersebut bahkan tak masuk Program Legislasi Nasional 2025. Ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR tidak serius membenahi regulasi untuk melindungi uang negara dari korupsi. Presiden Prabowo juga belum menyuguhkan langkah nyata memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan.

Publik justru diperlihatkan manuver pemerintah dalam pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara yang kilat dan jauh dari tata kelola yang baik. Struktur direksi Danantara diwarnai rangkap jabatan yang rawan konflik kepentingan. Lembaga ini juga dikhawatirkan menjadi super dengan pengawasan minimalis. Laporan keuangannya hanya diaudit akuntan publik, bukan BPK atau BPKP, kecuali atas permintaan DPR.

Lebih ironis, UU No.1 Tahun 2025 yang menjadi dasar pembentukan Danantara justru menghapus status direksi, komisaris, dan pengawas BUMN sebagai penyelenggara negara, bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 1999. Artinya, pejabat BUMN dan Danantara yang akan mengelola aset sebesar Rp14 ribu triliun dapat berlindung di balik “business judgment rule” dan menghindari jerat penegak hukum, termasuk KPK.

Apa artinya beragam kondisi ini dengan pemberantasan korupsi? Publik patut waswas korupsi makin besar, bukan hanya karena praktik korupsinya, tetapi arah kebijakan pemerintahan yang mengabaikan prinsip good governance. Tanpa penguatan pengawasan publik, kondisi ini akan membawa Indonesia ke arah yang semakin jauh dari cita-cita penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN dan Asta Cita.

Agus Sunaryanto

Koordinator ICW



#Tahun Politik, Tahun Perlawanan Kecurangan

Tahun 2024 menjadi puncak tahun politik. Setelah pemilihan presiden dan legislatif pada 14 Februari 2024, tahun politik disambung pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 27 November 2024.

Pemilu yang idealnya menjadi hajatan publik untuk menghukum dan memilih pemimpin dan wakilnya justru diwarnai berbagai masalah. Pada pemilu 2024, kecurangan pemilu menjelma menjadi kecurangan yang sangat kompleks di berbagai lini. Pemilu 2024 sebatas menunjukkan hasrat perebutan kekuasaan yang menghalalkan ragam cara. Tidak ada netralitas negara, cawe-cawe Presiden menguat.

Kejanggalan pemilu kuat terendus dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi karpet merah pencalonan putra mahkota Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden. Putusan berbau konflik kepentingan itu bukan satu peristiwa tunggal yang mengusik integritas pemilu. Sebelumnya, terjadi pelemahan pengawasan netralitas birokrasi melalui penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam revisi UU Aparatur Sipil Negara. Penggelontoran bantuan sosial pada linimasa kritis pemilu juga semakin membuat arena kompetisi pemilu makin tidak adil.

Di tengah pemilu yang compang camping, ICW terus mengambil peran mengawal pemilu. Bersama jaringan antikorupsi kami melakukan pemantauan pilpres dan pileg. Kami juga melawan ketertutupan informasi pemilu dengan bersengketa melawan Komisi Pemilihan Umum di Komisi Informasi. Ketertutupan informasi adalah persoalan yang belum juga menemukan obat mujarabnya.

Pengembangan Rekamjejak.net

Sejak 2015, ICW mengembangkan kanal RekamJejaknet. Melalui kanal ini, ICW menginformasikan rekam jejak pejabat publik, terutama keberpihakannya terhadap antikorupsi, hak asasi manusia, lingkungan, dan keberagaman.

Jelang pilkada 2024, kami mengembangkan fitur khusus agar publik dapat menelusuri afiliasi calon kepala daerah, khususnya calon gubernur dan wakilnya di 37 provinsi serta sampel sejumlah individu calon kepala daerah yang berkontestasi di 89 kabupaten/ kota.

Secara keseluruhan, situs rekam jejak menampilkan profil calon, koalisi partai pengusung, informasi laporan harta kekayaan, afiliasi dinasti politik, serta catatan terkait kasus korupsi 582 calon. Olah data kami menemukan bahwa 155 dari total 582 calon kepala daerah terindikasi dinasti politik. Informasi yang tersaji dikompilasi dari sumber-sumber publik sebagai respon ketidakmampuan KPU menyediakan data-data kandidat untuk pemilih konsumsi.

ICW juga menyediakan fitur baru yang membuka ruang publik memberikan informasi tambahan atau umpan balik terhadap informasi yang tersedia. Fitur ini kami luncurkan pada 26 November 2024 bersama key opinion leaders, komunitas orang muda, dan koalisi masyarakat sipil yang juga bersemangat menghadirkan informasi kandidat lebih bermakna di pilkada.

Sejak diluncurkan ulang, Rekam Jejak mendapat peningkatan akses hingga 536.000 kunjungan website, dan 59.748 engagement di media sosial. Ada 26 pengunjung yang aktif mengirimkan umpan balik, pertanyaan, dan informasi tambahan untuk melengkapi data dalam fitur Pilkada 2024.

Meski tahun pemilu telah berlalu, ICW terus berkomitmen merawat kanal ini agar pemilih terus mendapat informasi mengenai pejabat publik.

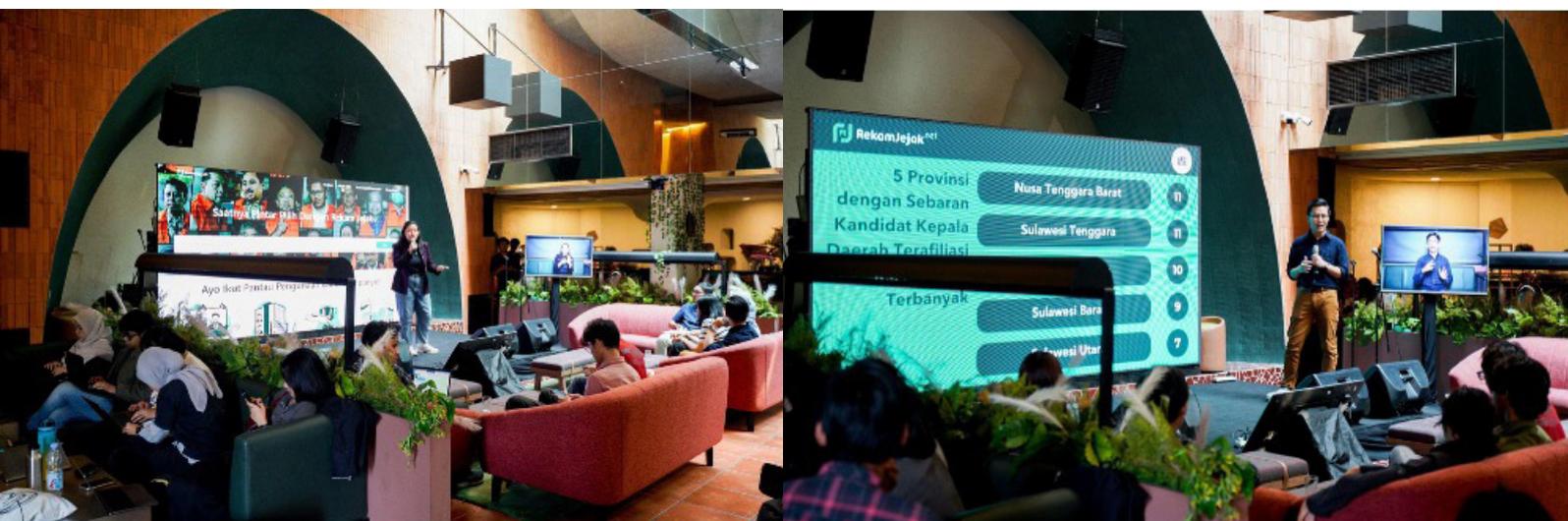


Foto 1. Sesi pemaparan fitur baru Rekam Jejak dan hasil pemantauan Pilkada 2024 oleh peneliti ICW (26/11)



Foto 2. Sesi gelar wicara dengan akademisi Universitas Katolik Atma Jaya, Malaka Project, dan ICW untuk membahas isu Pilkada 2024 yang dimoderatori oleh YLBHI (26/11)



Foto 3. Sesi hiburan penampilan musik sebagai penutup kegiatan re-launching Situs [Rekamjejak.net](https://www.rekamjejak.net) (26/11)

Melawan Ketertutupan KPU RI dan Partai Politik

Untuk menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang transparan, ICW melayangkan permohonan informasi sebagai bentuk aktualisasi hak yang dijamin UU Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang kami mohon antara lain terkait dengan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) serta sejumlah dokumen anggaran 13 partai politik tingkat pusat.

Kami tidak tinggal diam ketika desakan kami diabaikan KPU dan sejumlah partai. Informasi tidak didapat, ICW melayangkan permohonan sengketa ke Komisi Informasi. Melalui sengketa informasi kami mendapat penegasan melalui putusan Komisi Informasi bahwa laporan dana kampanye merupakan informasi publik yang terbuka.

Namun, Komisi Informasi berpihak pada KPU dengan menyatakan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) merupakan informasi tertutup. Ini merupakan langkah mundur transparansi bidang elektoral. Sebagai pembanding, LPSDK pada 2019 diumumkan ke publik dengan menampilkan nama penyumbang individu dan korporasi. Informasi penyumbang kampanye ini krusial untuk mengawasi dan mencegah korupsi politik.

Putusan Komisi Informasi 109/KIP-PSIP-M-A/VIII/2024 terkesan tidak konsisten dengan putusan nomor 085/VIII/KIP-PSI/2023 yang menegaskan informasi yang dimohonkan ICW dalam bentuk rencana penggunaan anggaran partai, laporan realisasi anggaran, hingga laporan arus kas, merupakan informasi yang terbuka untuk publik sepanjang telah diaudit dan anggarannya bersumber dari APBN.

Putusan ini juga memukul mundur keterbukaan informasi keuangan partai. Satu dekade lalu, Komisi Informasi menyatakan laporan keuangan partai dari berbagai sumber sebagai informasi terbuka. Penting dicatat, anggaran partai dari negara dalam bentuk bantuan politik tidak lebih dari 1% pengeluaran tahunan partai. Artinya, putusan ini menutup 99% informasi keuangan partai.

Dari Pemantauan ke Judicial Review

ICW bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Themis, dan jaringan antikorupsi di 10 provinsi merawat asa dengan berkolaborasi memantau pemilu 2024. Kami sejak awal menyadari pemantauan pemilu kali ini akan lebih berat. Selain keterbatasan dan ancaman dalam melakukan pemantauan, kecurangan pemilu dipredikasi berlangsung lebih sistematis dan penuh “penjagaan”.

Pemantauan berpusat pada politisasi instrumen negara, politik uang, dan manipulasi penghitungan suara. Dari banyaknya informasi yang didapat, kami mengkurasi 110 dugaan kecurangan. Lebih dari setengahnya berkaitan dengan netralitas aparatur negara, kepala desa, penyelenggara pemilu, dan penyalahgunaan fasilitas negara.

Pemantauan pemilu berhadapan dengan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang melempem. Bawaslu enggan mendaftarkan laporan kami, seperti terkait akun X @Kemhan_RI yang mengkampanyekan Prabowo-Gibran. Laporan tidak memenuhi syarat materiil menjadi alasan. Sikap yang sama ditunjukkan Bawaslu Jawa Tengah saat pemantau melaporkan dugaan pelanggaran rekapitulasi suara pileg. Jangankan diinvestigasi, diterima saja tidak.

Pemilu yang porak-poranda akan berdampak pada legitimasi pemerintahan yang lahir dari pemilu. Potensi korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi kebijakan, dan pengabaian kepentingan publik akan semakin menjadi-jadi. Kondisi ini diperparah dengan pelemahan penegak hukum dan lembaga pengawas independen.

Melihat kuatnya politisasi negara pada pemilu 2024, ICW bersama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dengan didampingi Themis menggugat revisi UU ASN ke Mahkamah Konstitusi. Revisi UU ASN telah meniadakan lembaga negara independen yang bertugas mengawasi sistem merit dan netralitas ASN.

Gugatan kami berangkat dari keyakinan pilkada 2024 terancam kecurangan yang tidak kalah merusak. Birokrasi ke depan juga akan semakin rentan politisasi dan korupsi. Judicial review kini memasuki tahap pemeriksaan dan akan terus berlanjut pada 2025.





Foto 4. Lembaga Pengawas Netralitas ASN Dimatikan, Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi



#Dukungan Sahabat ICW Memperluas Jangkauan Kampanye Antikorupsi

Pendanaan publik ICW berasal dari tiga sumber utama: autodebet, donasi satu kali (one-time donation atau OTD), dan sponsor lembaga. Tahun ini ICW menerima dukungan dari 2 sponsor, yaitu Bank Republik Indonesia (BRI) Rp 50 juta dan Dompot Dhuafa Rp 45 juta.

Pada skema autodebet, donasi tertinggi tercatat pada September, yaitu Rp20.563.888,-, dan terendah pada Desember dengan angka Rp12.813.888,-. OTD juga mengalami penurunan sebesar 41% dari tahun 2023. Donasi tertinggi terjadi pada September sebesar Rp26.750.000,- ketika ICW menggelar Malam Galang Dana untuk pembiayaan Sekolah Antikorupsi.

Secara umum, terjadi penurunan tren pendanaan publik. Penurunan tren ini disebabkan berbagai faktor, utamanya pengembangan strategi baru yang belum menjadi fokus ICW.

Sumber Dukungan	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
One Time Donation	14.688.000,-	90.030.000,-	52.867.777,-
Auto Debet	223.034.656,-	260.241.656,-	217.049.990,-
Sponsor Lembaga	185.000.000,-	131.250.000,-	95.000.000,-
Total	422.722.656,-	481.521.656,-	364.917.767,-

Tabel 1 Perbandingan penerimaan dukungan publik ICW dari tahun 2022 - 2024

ICW saat ini mencoba mengembangkan sumber pendanaan alternatif melalui skema bisnis sosial dan investasi. Salah satunya melalui UNCORRUPTED, merek bisnis sosial yang mengangkat pesan antikorupsi melalui produk seperti kaos dan hoodie. Produk ini tidak hanya digunakan untuk menggalang dana, tetapi juga sebagai medium edukasi publik dalam melawan korupsi.





Foto 6. Produk UNCORRUPTED yang mengangkat isu antikorupsi dan demokrasi

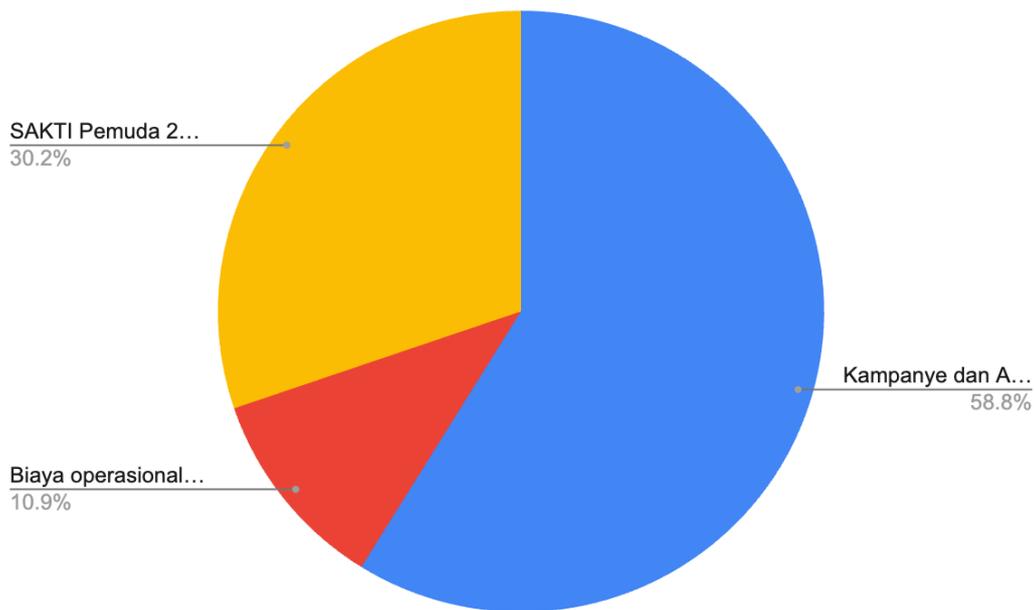
Total penjualan UNCORRUPTED pada 2024 sebesar Rp162.905.700,- dengan laba bersih Rp48.478.789 dari 1.233 produk terjual. Strategi kampanye disesuaikan dengan kampanye yang tengah ICW angkat, seperti peluncuran kaos “Korban Mulyono”. Tema kaos tersebut sebagai respons atas penggunaan simbol politik dinasti Jokowi. Hasil penjualan sepenuhnya digunakan untuk mendukung kampanye antikorupsi.

Selain dari bisnis sosial, ICW juga memperoleh pendapatan dari investasi di sektor obligasi dan koperasi simpan pinjam. Pada 2024, ICW menerima Rp93.151.300,- dari obligasi dan Rp197.700.000,- dari koperasi.

Total pendapatan ICW dari dukungan publik dan investasi tahun 2024 mencapai Rp526.317.856,-.

Penggunaan Dana PDP Tahun 2024:

- Kampanye dan Advokasi: Rp238.919.685,-
Digunakan untuk berbagai kegiatan kampanye dan advokasi antikorupsi.
- Operasional Penggalangan Dana: Rp44.468.585,-
Mencakup kebutuhan kerja dan operasional penggalangan dana.
- Program SAKTI Pemuda Tasikmalaya: Rp122.776.34,-
Mendukung inisiatif pemberdayaan pemuda di tingkat lokal untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah.



Grafik 1. presentasi penggunaan dana PDP ICW selama 2024

Sekolah Antikorupsi Tasikmalaya: Orang Muda yang Beraksi

ICW kembali menggelar SAKTI. SAKTI tahun ini diselenggarakan di Tasikmalaya, berkolaborasi dengan Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) pada 4–9 September 2024.

Ada 20 pemuda terpilih dari Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang mengikuti pelatihan intensif selama satu minggu. Mereka adalah penggerak organisasi atau komunitas yang berkomitmen mengembangkan inisiatif antikorupsi di lingkungan masing-masing.

Pelatihan dilakukan secara interaktif dengan materi seputar korupsi, advokasi, dan keterlibatan warga. Setelah pelatihan, alumni menyusun dan melaksanakan aksi antikorupsi lanjutan yang fokus pada isu lokal. Transparansi anggaran desa, pengawasan layanan publik, dan pendidikan politik menjadi pilihan alumni.

Semua peserta berhasil melaksanakan RTL, dan ICW memberikan pendampingan lanjutan untuk memastikan aksi mereka berdampak. Program ini memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan dan memperluas gerakan antikorupsi berbasis komunitas di daerah.

SAKTI Tasikmalaya 2024 menunjukkan bahwa pemuda punya peran penting dalam mendorong perubahan menuju pemerintahan yang bersih dari korupsi.



Foto 7. Aktivitas para peserta SAKTI Tasikmalaya 2024

Lewat GAAS, Alumni Sekolah Antikorupsi Beraksi!

ICW mendukung aksi antikorupsi yang digagas alumni SAKTI melalui program GAAS. Sepanjang 2024, GAAS memfasilitasi tiga inisiatif komunitas, antara lain:

- **Disabilitas dan Korupsi**

Hanaa Septiana, alumni SAKTI tahun 2015, menyoroti hambatan akses layanan publik bagi penyandang disabilitas. Hana dengan dukungan GAAS ICW melakukan survei layanan penyandang disabilitas di Surabaya, Jawa Timur. Hasil survei dikemas dalam bentuk podcast dan video pendek dengan berkolaborasi bersama Radio Braille Surabaya (RBS). Survei menemukan 55% fasilitas layanan publik untuk disabilitas sulit diakses. Masalah yang ditemukan misalnya bidang miring licin dan berisiko membuat pengguna kursi roda terpeleset. Ada pula persoalan guiding block trotoar tidak sesuai standar. Artinya, anggaran negara untuk menghadirkan fasilitas publik ramah disabilitas tidak optimal dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Survei menemukan 55% fasilitas layanan publik untuk disabilitas sulit diakses. Masalah yang ditemukan misalnya bidang miring licin dan berisiko membuat pengguna kursi roda terpeleset. Ada pula persoalan guiding block trotoar tidak sesuai standar. Artinya, anggaran negara untuk menghadirkan fasilitas publik ramah disabilitas tidak optimal dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

10 orang Sebagian responden belum menyadari pungli dan gratifikasi merupakan bentuk korupsi. Sejumlah responden masih menganggap korupsi sebatas penyalahgunaan uang negara. Beberapa responden bahkan mengaku pernah mengalami tindakan tersebut, tetapi menganggapnya sebagai hal wajar karena mempercepat urusan mereka.

Program ini berhasil meningkatkan kesadaran soal hak disabilitas dan mendorong pemahaman lebih luas tentang korupsi yang sering dianggap wajar. Podcast hasil program ini dapat diakses melalui tautan berikut: [Podcast Disabilitas dan Korupsi](#).



Foto 8. Cuplikan film pendek kolaborasi antara alumni SAKTI dan Radio Braile Surabaya (RBS)

- **Cergam Anak Antikorupsi: Korupsi Di Sekitar Kita**

Diprakarsai alumni SAKTI Seniman tahun 2019, Mohamad Rico Wicaksono, program ini menghasilkan buku cerita antikorupsi bergambar untuk anak. Buku ditulis dan dirancang secara kolaboratif oleh alumni SAKTI, Angga Wedhaswhara, Den Hasan, Estiani Ambarwati, Khoeruman Taos, Malati Nuwangi, Shofa Sophiyah, dan William Umboh serta Rico Wicaksono sebagai desainer.

Buku ini diluncurkan pada 8 November 2024 di Bandung dan mendapat sambutan hangat dari publik. Antusiasme terhadap buku ini sekaligus mengingatkan kita bahwa buku bertema antikorupsi untuk anak masih minim.

Ke depan, ICW berkomitmen mengadopsi dan mengembangkan inisiatif ini sebagai bentuk edukasi antikorupsi yang menarik dan ramah anak.



Foto 9. Launching cergam anak antikorupsi “Korupsi di Sekitar Kita”

- **Pameran Seni Antikorupsi Sumber Daya Alam: CIYAAAT!**

Inisiatif Hernanda Salsabila Putri, alumni SAKTI Krisis Iklim tahun 2022, menghadirkan pameran seni bertema korupsi Sumber Daya Alam (SDA) pada 27 Juni hingga 31 Oktober 2024 di Samarinda.

Pameran ini melibatkan delapan seniman lokal, yakni Ng Mawan, Sabrina, Dahri Dahlan, Fachmi, Kholif Mundriza, Hasbi Yahya, Salsabila, dan Rjo Samarprojek. Proses kreatif diawali wawancara warga dan dokumentasi tambang di Kutai Kartanegara. Salah satu karya yang menarik perhatian adalah “BISA DIATUR” oleh Fachmi R yang menyindir praktik suap proyek infrastruktur.

Pameran ini menjadi ruang refleksi penting bagi warga untuk memahami dampak korupsi terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di Kalimantan Timur.



Foto 10. Salah satu karya berjudul “Bisa Diatur” yang dipamerkan dalam pameran CIAAAT!

Pucuk Komedi 2024: Komedi Sebagai Media Kritik Sosial

Kompetisi Pucuk Komedi sukses digelar sebagai ajang pencarian bakat komika lokal di Banten. Acara ini diadakan di Pucuk Pare Coffee and Resto, Banten. Grand final bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024. Malam itu, 10 finalis berlaga memperebutkan gelar juara di hadapan tiga juri, yaitu Sigit Wijaya dari ICW, komika Ridwan Budiman, serta perwakilan dari Pucuk Pare Resto.

Sejak babak penyisihan, kompetisi ini menarik perhatian publik, baik secara langsung maupun melalui unggahan di akun Instagram Stand Up Indo Pandeglang. Salah satu penampilan yang berkesan datang dari Andis Brighter. Komika ini membawakan materi korupsi dan sulitnya anak muda di Banten mendapatkan kesempatan yang adil. Dengan gaya komedi yang cerdas, ia berhasil memancing tawa sekaligus menyentil kenyataan yang dihadapi oleh banyak orang.

Tidak hanya hiburan, acara ini membuka ruang kebebasan berekspresi dan pendidikan antikorupsi. Kesuksesan Pucuk Komedi membuktikan stand-up comedy dapat menjadi ruang untuk membicarakan isu korupsi dengan pendekatan ringan.



Foto 11. Heri Merkuri juara I Kompetisi Pucuk Komedi 2024 yang dilakukan di Cafe Pucuk Pare, Pandeglang, Banten

Nobar Film : Dear Future Children

Bekerja sama dengan Goethe-Institut Indonesien, ICW mengadakan nonton bareng dan diskusi film dokumenter “Dear Future Children”. Film ini mengisahkan perjuangan tiga aktivis muda dari Hong Kong, Chile, dan Uganda dalam menghadapi tantangan sosial dan politik di negara mereka.

Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap keterlibatan orang muda dalam perubahan sosial dan pemberantasan korupsi korupsi. Melalui diskusi setelah pemutaran film, peserta diajak merefleksikan perjuangan aktivis dengan konteks sosial di Indonesia saat ini.



Foto 12. Pelaksanaan Nobar Film: Dear Future Children

Rangkaian Kegiatan Memperingati 16HAKTP

Rangkaian kegiatan peringatan 16HAKTP merupakan bentuk solidaritas dan komitmen ICW terhadap isu gender dan penolakan pada kekerasan terhadap perempuan. ICW membuat podcast, diskusi, dan workshop pembuatan Zine bertema dampak korupsi terhadap ketidakadilan gender.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya peran perempuan dalam gerakan melawan ketidakadilan, utamanya dalam konteks korupsi dan bagaimana perempuan dapat bergerak dalam perlawanan. Melalui rangkaian acara ini, ICW berharap dapat memperkuat simpul jaringan dan merangkul perempuan untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi dan penindasan.



Foto 13. Rangkaian kegiatan peringatan 16HAKTP di Resonansi

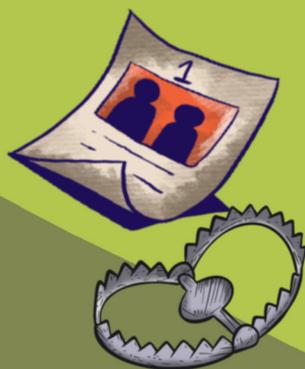


#Kolaborasi Seni: Membangun Kesadaran Kritis Warga

Program Art Collaboration (Art Collabs) ICW di NTT menghadirkan kolaborasi antara musisi dan komunitas untuk menyuarakan isu antikorupsi lewat album “Frekuensi Perangkap Tikus: Menenun Suara Timur.” Melibatkan Robi Navicula sebagai direktur musik dan grup lokal HLF, Marapu, serta Leisplang, karya yang lahir mengangkat kasus nyata: penyelewengan dana BOS, konflik panas bumi, dan perebutan tanah adat. Puncaknya, konser di Universitas Nusa Cendana pada 14 Desember 2024 memadukan musik, pameran, stand-up comedy, dan deklarasi integritas pemuda, dengan ratusan peserta hadir dan puluhan ribu pendengar mengakses album di YouTube dan Spotify. Kolaborasi ini menegaskan bahwa musik dapat menjadi alat perjuangan, menghubungkan suara masyarakat timur Indonesia dengan publik nasional hingga global.



Foto 14. Launching album FPT Vol 3: Menenun Suara Timur



#Membangun Jejaring Antikorupsi

Perluasan Pengguna Akademi Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi perlu semakin lantang dikampanyekan. ICW pada 2024 memperluas pendidikan antikorupsi ke berbagai kalangan, khususnya akademisi, ASN, serta pegawai BUMN/BUMD. Hasilnya, jumlah pengguna e-learning platform ICW akademi.antikorupsi.org mencapai 23.574 orang, meningkat sebanyak ___% dibanding tahun sebelumnya.

Untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan pengguna, ICW membangun kerja sama dengan perguruan tinggi di berbagai daerah:

Tabel 2. Daftar MoU ICW dengan Perguruan Tinggi, 2024

26 September 2024	Universitas Trunojoyo Madura	Jawa Timur
3 June 2024	Poltekkes Malang	Jawa Timur
5 July 2024	Widyagama Malang University	Jawa Timur
9 October 2024	Muhammadiyah Kotabumi Lampung	Lampung
8 March 2024	UIN Alauddin Makassar	Sulawesi Selatan
18 September 2024	UNWIRA Kupang	Nusa Tenggara Timur
5 July 2024	Universitas Muhammadiyah Malang	Jawa Timur
25 September 2024	Universitas Negeri Surabaya	Jawa Timur
11 Desember 2024	Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang	Jawa Timur
13 November 2024	Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya	Jawa Timur
14 November 2024	UIN Sunan Ampel Surabaya	Jawa Timur
16 November 2024	Universitas Ciputra Surabaya	Jawa Timur

Selain kampus, ICW juga menjalin kerja sama dengan sektor BUMN, salah satunya PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). Sebanyak 82 staf PT SIER telah mengikuti pelatihan modul “Korupsi dan Korporasi”. Program ini akan berlanjut dengan kegiatan antikorupsi lainnya.

Akademi Antikorupsi juga menjangkau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Nusa Tenggara Timur. Pelatihan Akademi Antikorupsi di NTT menjangkau staf Inspektorat, BKD, BPKAD, Dinas Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, serta Dinas Sosial. Sebanyak 43 staf Inspektorat dan 67 staf OPD telah mengikuti kursus “Korupsi dan Reformasi Birokrasi”.

Tidak berhenti di situ, ICW dan Inspektorat Provinsi NTT menandatangani kerja sama bersama Dinas Pendidikan untuk berkolaborasi melakukan pendidikan antikorupsi. Setelahnya, ICW memberi pelatihan kepada pelajar SMA se-Kota dan

Kabupaten Kupang. 99 siswa dan guru dari 30 sekolah berhasil menyelesaikan modul “Korupsi dan Iklim” di Akademi Antikorupsi dan siap jadi agen kampanye antikorupsi.

Peningkatan pengguna Akademi Antikorupsi juga didukung kampanye media sosial yang konsisten. Jumlah pengikut Akademi Antikorupsi di Instagram meningkat dari 1.000 followers pada Januari 2024 menjadi 4.004 followers pada Januari 2025. Upaya promosi ini turut mendorong pengguna yang mendaftar secara mandiri. 196 peserta mendaftar melalui jalur media sosial, termasuk 19 orang dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.



Hal yang menambah optimis, alumni Akademi Antikorupsi mulai aktif mempromosikan platform ini di lingkungan kerja mereka. Alumni yang bekerja di Inspektorat Kementerian Kesehatan mendorong lembaganya menggunakan Akademi Antikorupsi. Inisiatif itu direspon positif. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkes mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh staf mengikuti modul ISO 37001 di Akademi Antikorupsi. Hingga akhir Desember 2024, tercatat 234 dari 239 staf Inspektorat Kemenkes telah menyelesaikan modul tersebut.

Upaya edukasi ini diharapkan memberi dampak nyata bagi gerakan antikorupsi. Harapannya, semakin banyak orang memahami isu korupsi, semakin banyak pula orang yang tergerak terlibat dalam gerakan antikorupsi.

AKJA 2024: Menyalakan Api Antikorupsi dari Daerah

ICW kembali menggelar Anugerah Karya Journalistik Antikorupsi (AKJA). Sebagai bentuk apresiasi ICW kepada jurnalis yang mengawal pemberantasan korupsi, AKJA juga kami selenggarakan sebagai upaya memperkuat jurnalisisme investigasi pada isu antikorupsi.

AKJA 2024 kami fokuskan untuk karya jurnalistik di Aceh, Sumatera Utara, Banten, NTT, Kalimantan Timur, dan Bali. AKJA yang diselenggarakan 20-21 September 2024 ini kami selenggarakan bersama komunitas lokal di Denpasar Utara, Bali. Selain memberi penghargaan, kami menggelar nonton bareng dan diskusi pemilu serta workshop pembuatan zine antikorupsi.

AKJA ICW berikan untuk satu kategori karya terbaik dan empat kategori karya favorit berdasarkan 4 kriteria: pemilihan isu, dampak, metode liputan, dan teknik penulisan. Karya terbaik dimenangkan oleh tim Klub Journalistik Investigasi (KJI) Bali yang meliput investigasi tentang dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Tim KJI Banten meraih dua penghargaan dengan kategori karya terfavorit dampak liputan dan metode peliputan. Sedangkan tim KJI Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan karya terfavorit untuk kategori pemilihan isu yang relevan dengan konteks lokal.

Melalui AKJA, ICW berharap api perlawanan terhadap korupsi semakin didukung jurnalisisme yang kuat. Karya jurnalistik bukan hanya membuka dan menyebarkan informasi, tapi juga dapat membongkar kasus dan menggerakkan publik untuk ikut melakukan pengawalan.



Foto 15. Nonton bareng dan diskus, rangkaian kegiatan AKJA 2024, (20/9)



Foto 16. Pembukaan acara, diskusi publik, dan pameran rangkaian kegiatan AKJA 2024, (20/9)



Foto 17. Diskusi publik, rangkaian kegiatan AKJA 2024, (21/9).



Foto 18. Sambutan dan pengumuman pemenang AKJA 2024, (21/9)

#Mengawal Pengadaan Pemerintah, Lahan Basah Korupsi Warga Kawal Pengadaan

Partisipasi warga memegang peran penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bagi ICW, keterlibatan warga adalah bentuk nyata dari kontrol atas penggunaan uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak.

Sesuai dengan visi kelembagaan, ICW terus memperkuat peran warga dalam mengawasi pengadaan publik, sektor basah yang setiap tahun menerima anggaran sangat besar. Pada 2024, total rencana anggaran pengadaan publik mencapai Rp1.255 triliun.¹ Tanpa pengawasan yang memadai, anggaran sebesar ini sangat rentan disalahgunakan.

Sepanjang 2016-2023, terdapat 1.891 kasus korupsi pengadaan yang disidik aparat penegak hukum dengan total kerugian negara lebih dari Rp90,61 triliun. Data yang ICW kumpulkan ini menegaskan pentingnya pelibatan publik dalam mencegah penyimpangan sejak awal.

Untuk menguatkan peran warga, ICW menyelenggarakan pelatihan pemantauan pengadaan publik yang berhasil melibatkan 76 warga dari berbagai daerah, terdiri dari 41 perempuan (54%) dan 35 laki-laki (46%).

Pencapaian penting dari pelatihan ini adalah keberhasilan warga dalam menyusun dan melaporkan 21 temuan dugaan pelanggaran pengadaan dengan total nilai proyek Rp278,5 miliar. Laporan itu mencakup dugaan kesalahan perencanaan konstruksi, keterlambatan penyelesaian proyek, hingga keterlibatan perusahaan yang bermasalah.

Sektor-sektor yang menjadi objek pemantauan meliputi:

- Transportasi (8 kasus)
- Pendidikan (5 kasus)
- Pariwisata (3 kasus)
- Pasar (1 kasus)
- Kebudayaan (1 kasus)
- Keagamaan (1 kasus)

Seluruh temuan ini telah disampaikan melalui kanal pengaduan e-pengaduan. lkpp.go.id. Hasilnya, 16 dari 21 laporan telah ditindaklanjuti oleh LKPP dan diteruskan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

ICW berkomitmen terus membersamai warga mengawal tindak lanjut penanganan pengaduan untuk memastikan aduan ditangani secara serius dan berbuah manis pada perbaikan sistem pengadaan publik.

¹ LKPP Bigbox, 2024, <https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860>



Foto 19. Pelatihan Pemantauan Pengadaan Publik di Kota Semarang



Foto 20. Diskusi penyusunan laporan dugaan kasus pelanggaran pengadaan publik di Kota Kupang

Kolaborasi KJI Mengawal Pengadaan Publik

Klub Jurnalis Investigasi (KJI) yang diinisiasi salah satunya oleh ICW sejak 2019 menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga akhir 2024, KJI telah terbentuk di tujuh wilayah, yaitu Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Bali.

Investigasi Pengadaan Gas Air Mata

Salah satu sorotan utama tahun ini adalah publikasi hasil liputan investigasi kolaboratif tentang pengadaan pelontar gas air mata di Kepolisian. Liputan ini mengungkap dugaan mark-up harga dan potensi konflik kepentingan karena keterlibatan pihak yang memiliki hubungan dekat dengan institusi Kepolisian.

Investigasi ini digarap bersama enam media nasional, yaitu TEMPO, Project Multatuli, Jaring.id, Suara.com, Narasi TV, dan Liputan 6 SCTV. Liputan investigasi ini merupakan contoh nyata keberhasilan kerja kolaboratif dalam mengungkap dugaan pelanggaran pada pengadaan publik.



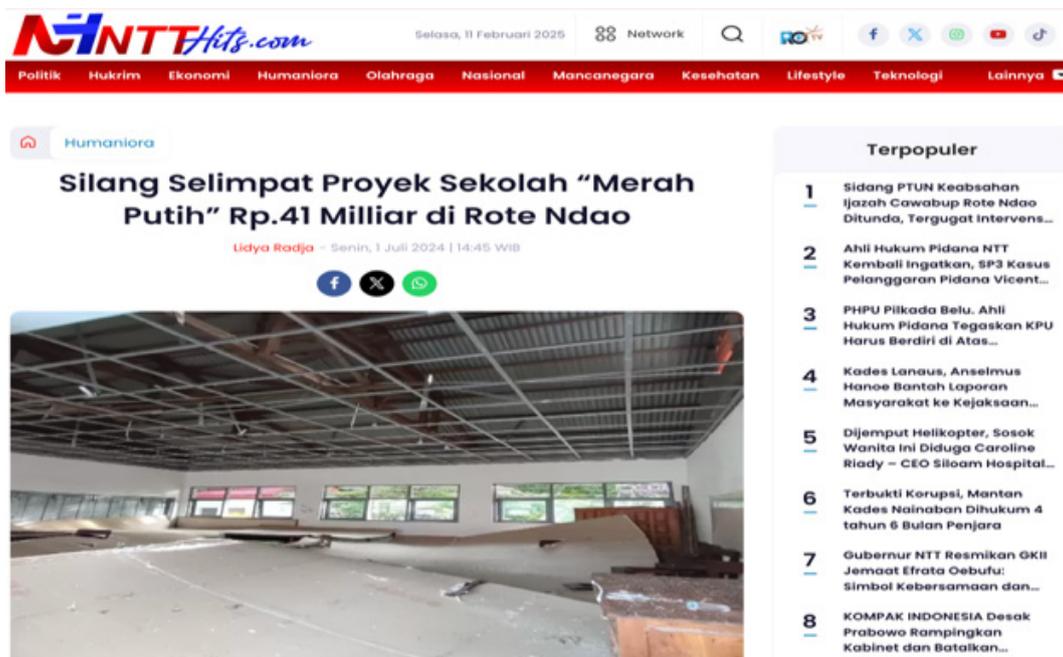
Gambar 2. Tangkapan layar salah satu liputan KJI Jakarta

Investigasi Proyek Sekolah Merah Putih di NTT

Liputan penting lainnya datang dari KJI NTT, yang menelusuri proyek perbaikan sekolah Di NTT. Investigasi bermula dari temuan awal di opentender.net, yang mengidentifikasi proyek ini sebagai salah satu pengadaan berisiko tinggi.

Temuan tersebut diperkuat melalui observasi lapangan, yang menemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan, khususnya terkait kualitas material dan mutu pekerjaan. Kondisi ini mendorong sebagian besar sekolah penerima bantuan menolak menandatangani berita acara serah terima.

Liputan ini dikerjakan oleh empat media lokal, yakni ntthits.com, digtara.com, beritanusra.com, dan koranntt.com. Publikasi tersebut memperkuat peran jurnalisme lokal dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di sektor pendidikan.



Gambar 3. Tangkapan layar salah satu liputan KJI NTT

Memperkuat Ekosistem Jurnalisme Investigasi



Sebagai ruang kolaborasi jurnalis dari berbagai daerah, KJI terus berkembang menjadi kelompok kerja yang fokus pada isu-isu publik, terutama yang berkaitan dengan antikorupsi. Permintaan pembentukan KJI di daerah lain terus berdatangan, menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan ruang investigasi yang terorganisi.

Untuk mendukung penguatan tersebut, ICW menyusun sebuah buku saku (e-book) yang mendokumentasikan praktik baik kolaborasi jurnalis investigasi di berbagai daerah. Buku ini membahas bagaimana kerja kolektif KJI berhasil mengungkap skandal korupsi yang melibatkan berbagai pejabat publik di tingkat nasional dan daerah, sekaligus menjadi panduan bagi jurnalis yang ingin mereplikasi model serupa di wilayah lain.

Mendorong Penanganan Aduan PBJ yang Lebih Responsif

Penanganan aduan masyarakat terkait pengadaan barang/ jasa (PBJ) membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat. Tanpa komitmen pimpinan, aturan yang jelas, anggaran, dan staf yang memadai, proses tindak lanjut aduan bisa terhambat dan bahkan membuat warga enggan kembali melapor.

Sepanjang 2024, ICW bekerja sama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di tiga daerah yakni Kabupaten Maros, Kota Kupang, dan Kota Semarang dalam menindaklanjuti aduan masyarakat. Bersama dengan YASMIB, Bengkel APPEK, dan PATTIRO Semarang, kami bersepakat untuk memperkuat peran APIP dalam menindaklanjuti aduan masyarakat.

Hasil utama dari kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah adalah disahkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan PBJ. SOP tersebut dijadikan panduan kerja bagi Inspektorat di tiga daerah ketika menerima aduan berkaitan dengan pengadaan.

Dengan adanya SOP tersebut diharapkan mampu mengakselerasi kinerja APIP dalam memberikan pelayanan yang baik dan dapat memberikan kepastian layanan. Untuk menguji implementasi SOP tersebut, jaringan ICW di tiga daerah bersama dengan kelompok warga berhasil melaporkan 15 kasus dugaan pelanggaran di sektor pengadaan publik ke APIP. Selanjutnya, kami akan terus mengawal SOP tersebut agar dapat diimplementasikan secara konsisten.



Foto 21. Diskusi penyusunan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadaan Publik bersama APIP Kota Kupang

Penilaian Kinerja Swasta Kunci Mencegah Korupsi Dalam Rantai Pengadaan

Perusahaan merupakan salah satu aktor yang paling banyak tersangkut korupsi, terutama pada kasus korupsi pengadaan publik. Untuk mencegah terpilihnya perusahaan yang bermasalah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengembangkan sistem penilaian kinerja penyedia. Tujuannya untuk mendorong akuntabilitas dan memastikan penyedia yang dipilih memiliki rekam jejak baik.

Namun, implementasi penilaian kinerja ini masih sangat rendah. Pada 2022 dan 2023, kurang dari 20 persen penyedia mendapatkan penilaian dari panitia pengadaan. Beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya penilaian kinerja penyedia antara lain karena keterbatasan jumlah dan kapasitas panitia, tidak adanya penegakan terhadap penilaian kinerja, serta belum terintegrasinya sistem informasi yang mendukung proses penilaian.

Merespons kondisi di atas, ICW menyusun kertas kebijakan yang membandingkan praktik penilaian kinerja penyedia di Amerika Serikat dan Kanada berdasarkan sejumlah indikator. Hasil kajian ini kami sampaikan kepada para pemangku kebijakan, seperti LKPP, Stranas Pencegahan Korupsi, dan Kementerian Keuangan, sebagai upaya untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap penyedia.



Foto 22. Penyerahan Ringkasan Eksekutif Penilaian Kinerja Penyedia oleh ICW kepada LKPP



Foto 23. Pemaparan dalam Diskusi terkait Hasil Riset Penilaian Kinerja Penyedia ke Stranas PK



Foto 24. Foto Bersama dalam Agenda Diskusi Pemaparan Kertas Kebijakan ke Kementerian Keuangan



#Advokasi Kebijakan Antikorupsi

Roadshow Mendorong Percepatan Pembahasan RUU Perampasan Aset

Sepanjang tahun 2024, ICW terus mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU PATP). Meskipun Presiden telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR pada Mei 2023, tidak ada tindak lanjut yang serius dari pemerintah. Bahkan, hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, RUU ini belum menjadi agenda prioritas, dan belum ada kepastian kelanjutan pembahasan di bawah Presiden Prabowo.

Untuk memperkuat dukungan publik terhadap pentingnya pengesahan RUU ini, ICW bekerja sama dengan sejumlah pusat studi universitas menyelenggarakan diskusi publik di tiga kota, antara lain: Padang (Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas), Yogyakarta (Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia), dan Samarinda (Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mulawarman).

Diskusi ini juga menjadi forum untuk menyebarkan hasil kajian bersama berjudul “Eksaminasi Publik atas Putusan Korupsi PT Asuransi Jiwasraya” yang diluncurkan pada Juli 2024. Kajian ini menunjukkan pentingnya regulasi yang kuat untuk merampas aset hasil korupsi dan mempertegas urgensi pengesahan RUU PATP dalam agenda pemberantasan korupsi.



Foto 25. Diskusi Publik Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset yang diselenggarakan ICW dan PUSaKO Universitas Andalas, di Padang, Sumatera Barat (15/10/2024)



Foto 26. Diskusi Publik Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset yang diselenggarakan ICW dan PSKE Universitas Islam Indonesia , di Yogyakarta (23/10/2024)



Foto 27. Diskusi Publik Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset yang diselenggarakan ICW dan SAKSI Universitas Mulawarman, di Samarinda, Kalimantan Timur (8/11/2024)

Mengawal Seleksi Komisioner KPK

Selama tahun 2024, ICW terus mengawal proses seleksi pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2024. Seleksi ini dapat berpotensi sebagai momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK, setelah kinerjanya dan independensinya hancur selama lima tahun terakhir.

Namun, proses seleksi yang berlangsung justru menimbulkan banyak catatan kritis. Dimulai dari pembentukan panitia seleksi (Pansel) oleh Presiden, yang komposisinya mayoritas berasal dari unsur pemerintah. Konfigurasi ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi konflik kepentingan dan lemahnya independensi dalam proses seleksi.

Kekhawatiran tersebut terbukti ketika Pansel terkesan memberi ruang besar bagi kandidat dari instansi penegak hukum lain, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. Padahal, Undang-Undang KPK tidak mewajibkan pimpinan berasal dari lembaga penegak hukum. Justru, hal ini memiliki potensi risiko menimbulkan konflik kepentingan, mengingat KPK memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi di instansi asal kandidat.





Sebagai bentuk partisipasi publik, ICW bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyampaikan rekomendasi calon Pansel kepada Kantor Staff Presiden serta mendorong transparansi proses seleksi. Pada September 2024, ICW dan PSHK juga merilis laporan kinerja KPK 2019-2024 yang mencakup aspek kelembagaan, penindakan, dan pencegahan. Selain itu, ICW bekerja sama dengan jurnalis untuk menyusun dan menyerahkan rekam jejak para kandidat kepada Pansel dan Komisi III DPR RI sebagai masukan dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Sayangnya, masukan dari masyarakat tidak dijadikan sebagai pertimbangan. 4 dari 5 pimpinan KPK yang terpilih berlatar belakang penegak hukum, baik yang masih aktif maupun telah purna tugas. Terlebih, seluruh pimpinan terpilih berasal dari instansi negara, tanpa keterwakilan dari unsur masyarakat sipil sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang KPK.

Kondisi ini memperlihatkan proses seleksi merupakan kelanjutan dari pelemahan KPK yang sistematis. Kegagalan untuk menghadirkan figur independen yang berintegritas dalam kepemimpinan KPK periode 2024-2029 dikhawatirkan akan semakin menurunkan kepercayaan publik serta memperlemah peran KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.



Menggugat Pemenuhan Wajib Belajar Bebas Biaya

Berbagai praktik korupsi, mulai pungli berkedok sumbangan di sekolah hingga korupsi infrastruktur pendidikan bernilai miliaran, masih mewarnai dunia pendidikan. Selain itu, pada penerimaan siswa baru juga masih karut marut sedangkan di Perguruan Tinggi, sempat muncul wacana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mencekik mahasiswa. Pertanyaan yang layak dilontarkan tentu saja, dimana peran negara dan untuk apa anggaran pendidikan yang dari anggaran nasional (belum daerah) pada 2024 saja mencapai Rp 665 Triliun?

Jika ditelisik dari penggunaan APBN 2024 dan rencana APBN 2025, terlihat bahwa anggaran pendidikan belum diprioritaskan untuk penyelenggaraan pendidikan, baik itu dasar, menengah, atau tinggi. Pengelolaan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun juga tidak efektif dan efisien akibat korupsi. Padahal, UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah memandatkan negara menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya. Artinya, anggaran negara untuk pendidikan wajib diprioritaskan untuk kepentingan tersebut, disusul pendidikan menengah dan tinggi, yang menjadi elemen kunci mencapai Indonesia Emas.

ICW dan Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (KOPAJA) secara kolektif berupaya menggugat pemenuhan kewajiban konstitusional wajib belajar bebas biaya dan praktik korupsi di sektor pendidikan. Salah satu langkah yang ICW lakukan yaitu mendukung upaya koalisi yang diwakili Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dalam menguji norma Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas demi terlaksananya sekolah bebas biaya di sekolah negeri dan swasta. Dukungan ICW dilakukan dengan berkampanye dan mengajukan diri sebagai sahabat peradilan (*amicus curiae*) ke Mahkamah Konstitusi. ICW menyampaikan pendapat dan analisis atas abainya negara dalam melaksanakan kewajiban konstitusional wajib belajar, baik itu dari aspek pengelolaan anggaran dan persoalan korupsi.

ICW bersama koalisi juga mendorong peran aktif para legislator dalam mengawal pelaksanaan kewajiban negara dalam wajib belajar dan pengelolaan anggaran yang tepat prioritas dan bersih dari KKN. Dalam catatan yang disampaikan kepada Panja Pembiayaan Pendidikan DPR RI di forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), ICW mengkritik penganggaran pendidikan yang asal-asalan dan lemahnya pengawasan DPR.

Keterlibatan ICW dalam advokasi pendidikan di atas tak lepas dari aduan yang disampaikan publik kepada ICW mengenai korupsi pendidikan yang merugikan warga, termasuk di level sekolah. Negara hanya seolah-olah sudah memenuhi amanat UU untuk mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk pendidikan, tetapi penggunaannya tidak benar-benar untuk kebutuhan prioritas pendidikan. Hal tersebut berdampak pada kurangnya anggaran penyelenggaraan pendidikan dan kemudian melahirkan beragam praktik pungli kepada warga yang mengakses pendidikan.



#Resonansi Antikorupsi di Regional dan Internasional

Korupsi adalah masalah global yang juga perlu diperangi bersama komunitas internasional. Tidak hanya belajar dari pengalaman dan inisiatif dari negara lain, kita penting menggalang dukungan internasional untuk menyuarakan perlawanan korupsi.

Sebagai perwakilan board member UNCAC Coalition wilayah Asia-Pacific sejak 2023, ICW menyerahkan dua pernyataan tertulis dalam UNCAC Implementation Review Group sesi ke-15 yang diadakan di Vienna pada 28-30 Agustus 2024. ICW menyoroti pentingnya pelibatan perempuan dan orang muda dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan pelapor dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengadaan tanpa risiko retaliasi.

ICW turut menggalang solidaritas lintas negara untuk merespons kekerasan terhadap massa aksi di Indonesia. Bersama 130 organisasi masyarakat sipil dari lebih dari 10 negara, ICW menyerukan penghentian penggunaan gas air mata secara brutal oleh kepolisian saat aksi protes menolak revisi UU Pilkada.

Dalam upaya memperluas jaringan dan kolaborasi, ICW sepanjang 2024 bergabung dalam dua jaringan regional antikorupsi, yaitu Southeast Asia Anti-Corruption Network (SEA-ACN) dan Southeast Asia Network for Transparency and Accountable Governance (SEANTAG). Hal ini sebagai bagian dari strategi memperkuat sinergi dan simpul gerakan antikorupsi di kawasan Asia Tenggara.

